

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit serta pelayanan jasa keuangan yang mendapatkan imbal jasa dari perbedaan tingkat suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Jikrillah (2010) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu komponen perbankan yang didirikan untuk memberikan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. Tahapan yang rumit menjadi hambatan utama UMKM dalam memperoleh akses pendanaan, banyak didapatkan solusinya melalui layanan Bank Perkreditan Rakyat.

Tingkat kesehatan PD BPR BKK se- Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari pada PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah hal ini yang menjadikan perhatian pemegang saham dan *steakholder*, PD BPR BKK dan BKK sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk Pemerintah Daerah dengan tujuan adalah dapat memberikan solusi akses permodalan kepada usaha kecil dengan skim kredit khusus (Kredit Mikro BKK) yang dijamin oleh salah satu BUMD yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit tanpa menggunakan agunan (belum *bankable* tetapi *fisible*) dengan proses mudah, murah, dan cepat dan hadir di setiap kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dan juga dalam rangka juga memerangi bank titil/ lintah darat. Peran ini sangat strategis berbeda dengan

bank umum atau BPR swasta secara umum yang lebih berorientasi dalam mendapatkan keuntungan.

PD BPR BKK merupakan hasil merger diantara PD BKK setiap Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah yang sudah memenuhi kriteria menjadi bank sebagaimana yang dipersyaratkan oleh otoritas, sedangkan PD BKK merupakan BUMD yang masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga tingkat kesehatan perusahaan relatif belum baik sehingga memerlukan perhatian yang khusus oleh para pemangku kepentingan (steakholder). PD. BKK pada tanggal 4 September 1969 melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan surat keputusan: No.Dsa.G.226/1969/8/2/4 Tanggal 4 September 1969 jo. No. Dsa. G./1970 tanggal 19 November 1970. Dalam perkembangannya PD BPR BKK/BKK mengalami beberapa kali perubahan status hukum yaitu mulai dari status sebagai BUMD berdasar Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 1981, kemudian menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK/BKK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 1995 kemudian PD BKK ditetapkan dengan status hukum tersendiri berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2002.

Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. Dan terakhir kali ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 99 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2009,

tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. Pemegang saham PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (51%) dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (49%).

Perbedaan pola pengelolaan dan pengawasan PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Lembaga Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PD BPR BKK (33 Unit)	PD BKK (29 Unit)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Status sebagai BPR; 2. Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Dewan Pengawas dari unsur Pemegang Saham Kab/kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3. Taat dan patuh pada regulasi Perbankan (BPR) yang diterbitkan OJK selaku regulator, Peraturan Perundangan – undangan, Anggaran Dasar, dan Stantar Operasional Prosedur (SOP). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status masih sebagai Badan Kredit Kecamatan; 2. Belum diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya diawasi oleh Dewan Pengawas sebagai wakil Pemegang Saham Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3. Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Stantar Operasional Prosedur (SOP).

Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016

Penyaluran kredit PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah dapat berdampak cukup signifikan untuk berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio keungan *Return On Assets (ROA)* karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan

perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasinya secara keseluruhan serta sebagian aset dananya berasal dari simpanan masyarakat, sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas.

Laba sebagai tolak ukur penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan, yaitu *profitabilitas*. Sawir (2003) *profitabilitas* adalah hasil akhir bersih kebijakan manajemen perusahaan. Pengukuran *profitabilitas* salah satunya dengan rasio ROA adalah jumlah laba bersih dengan total aktiva. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang didapat dan menunjukkan efektifitas pengelolaan aset.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja keuangan seperti *Net Interest Margin* (NIM), *likuiditas* yang diukur dengan *Current Ratio* (CR) serta *efisiensi* (BOPO). Perusahaan jasa keuangan sebagai penghimpun dan penyalur dana (*intermediasi*) agar berupaya untuk menekan *cost of fund* seminimal mungkin. Biaya *intermediasi* diukur dengan selisih pendapatan bunga dengan beban bunga (Tin *et al.* 2011). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar *net interest margin* (NIM) suatu perusahaan, maka semakin besar pula *return on asset* (ROA) perusahaan tersebut, yang berarti kinerja keuangan tersebut semakin membaik atau meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya, jika *net interest margin*

(NIM) semakin kecil, *return on asset* (ROA) juga akan semakin kecil, dengan kata lain kinerja perusahaan tersebut semakin menurun.

Komponen lain yang mempengaruhi kinerja keuangan bank adalah *likuiditas*. *Likuiditas* penelitian ini dilihat dari aspek CR, rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin besar *prosentase CR*, maka perusahaan memiliki likuiditas yang baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan terhadap kondisi perusahaan serta nilai perusahaan bagi investor. Husnan (2013) *likuiditas* dapat digambarkan sebagai *aktiva* yang digunakan sebagai alat pembayaran yang paling lancar. Apabila dilihat dari segi profitabilitas, *CR* semakin tinggi mengakibatkan kas menganggur, sehingga dapat menurunkan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa *CR* memiliki hubungan tidak searah terhadap profitabilitas.

Selain faktor NIM dan CR yang perlu mendapatkan perhatian dalam kinerja keuangan bank adalah BOPO. Indikator kemampuan manajemen dalam mengontrol biaya dengan *efisiensi* biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) (Kosmidou *et al.*, 2008). Bank tidak bisa mengontrol biaya (boros) tidak akan dapat bersaing dengan kompetitornya dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan dana. Athanasoglou *et al.* (2008), biaya operasional mencerminkan pengeluaran dari manajemen bank, dan pengeluaran yang berhubungan negatif dengan *profitabilitas*, sehingga harus melakukan *efisiensi*, mencari dana murah dengan menurunkan biaya dana (*cost of fund*) untuk meningkatkan keuntungan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan NIM, CR dan BOPO terhadap kinerja lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah.

Berikut data rata-rata ROA, NIM, CR, dan BOPO dijelaskan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Rata-Rata ROA, NIM, CR dan BOPO pada PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Rasio	Tahun	PD BPR BKK	PD BKK	Rata-rata
<i>Profitabilitas (ROA)</i> (%)	2011	3,36	3,82	3,59
	2012	3,17	3,61	3,39
	2013	2,88	3,28	3,08
	2014	2,38	2,70	2,54
	2015	2,85	3,24	3,04
<i>Net Interest Margin (NIM)</i> (%)	2011	10,13	10,83	10,48
	2012	11,47	10,78	11,12
	2013	11,32	10,64	10,98
	2014	10,81	10,16	10,48
	2015	10,39	9,76	10,07
<i>Likuiditas (CR)</i> (%)	2011	21,54	24,51	23,02
	2012	20,90	23,79	22,34
	2013	19,62	22,32	20,97
	2014	19,02	21,65	20,33
	2015	19,21	21,86	20,53
<i>Efisiensi (BOPO)</i> (%)	2011	64,35	73,22	68,78
	2012	64,62	73,53	69,08
	2013	61,84	70,37	66,10
	2014	67,88	77,25	72,57
	2015	64,97	73,93	69,45

Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

ROA pada PD BPR BKK se- Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 - 2015 mengalami *fluktuasi* dan cenderung menurun dan untuk PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah juga mengalami *fluktuasi* dan cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang belum optimal.

NIM pada PD BPR BKK se- Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2011 - 2015 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan tingkat keuntungan yang semakin baik dan untuk PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah juga mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan semakin turun.

CR pada PD BPR BKK se- Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 - 2015 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dan untuk PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah juga mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas semakin menurun namun masih dalam batasan aman.

BOPO pada PD BPR BKK se- Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 – 2015 juga mengalami fluktuasi cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional yang meningkat atau pendapatan operasional yang cenderung menurun.

Research gap dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Research Gap

Variabel	Peneliti	Hasil
Pengaruh NIM terhadap ROA	Heri Susanto dan Nur Kholis (2016)	NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA
	Dwi Priyanto Agung Raharjo, Bambang Setiaji dan Syamsudin (2014)	NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA
	Reychard Griha, Zulbahridar dan Adri (2014)	NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
Pengaruh CR terhadap ROA	Heri Susanto dan Nur Kholis (2016)	CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
	Luh Putu Fiadevi Wulandari dan Luh Komang Sudjarni (2013)	CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
Pengaruh BOPO terhadap ROA	Dwi Priyanto Agung Raharjo, Bambang Setiaji dan Syamsudin (2014)	BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA
	Syamsul Maryadi ¹ dan Agus Tri Basuki ² (2014)	BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA
	Heri Susanto dan Nur Kholis (2016)	CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
	Reychard Griha, Zulbahridar dan Adri (2014)	NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
Profitabilitas (ROA, ROE, ROI)	Muhammad Asif Khan (2015)	Profitabilitas antara Bank Malaysia dengan Bank Pakistan menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati (2015)	Tingkat profitabilitas antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Christania Graciella Angel (2014)	Profitabilitas bank nasional dengan bank campuran menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Fibriyani Nur Khairin (2014)	Profitabilitas antara bank Mega dan Bank Mega Syariah menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Yogi Yudha Perwira (2015)	Profitabilitas (ROA) antara bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah – BNI Konvensional, BRI Konvensional, Bank Mandiri Konvensional menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Yogi Yudha Perwira (2015)	Profitabilitas (ROE) antara bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah – BNI Konvensional, BRI Konvensional, Bank Mandiri Konvensional menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan

Table 1.3 (lanjutan)

Variabel	Peneliti	Hasil
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Christania Graciella Angel (2014)	NIM bank nasional dengan bank asing menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Christania Graciella Angel (2014)	NIM bank nasional dengan bank campuran menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan
Likuiditas (CR, LDR, CSR, CAR)	Muhammad Asif Khan (2015)	Likuiditas antara Bank Malaysia dengan Bank Pakistan menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati (2015)	tingkat likuiditas antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Christania Graciella Angel (2014)	Likuiditas bank nasional, bank campuran dan bank asing menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Yogi Yudha Perwira (2015)	Likuiditas antara bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah – BNI Konvensional, BRI Konvensional, Bank Mandiri Konvensional menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan
Efisiensi (BOPO)	Yogi Yudha Perwira (2015)	BOPO antara bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah – BNI Konvensional, BRI Konvensional, Bank Mandiri Konvensional menunjukkan adanya perbedaan signifikan
	Thamrin, Liviawati & Rita Wiyati (2011)	BOPO antara Bank Umum Sayri'ah Dan Bank Umum Konvensional menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan

Berdasarkan fenomena diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh NIM, CR, dan BOPO terhadap kinerja keuangan pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan penelitian adalah apakah ada pengaruh NIM, CR, dan BOPO terhadap kinerja keuangan pada lembaga keuangan yang dikelola oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh positif NIM terhadap ROA pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah ada pengaruh positif CR terhadap ROA pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah ada pengaruh positif BOPO terhadap ROA pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah ?
4. Apakah ada perbedaan pengaruh positif NIM, CR, dan BOPO terhadap ROA pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh positif NIM terhadap ROA pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh positif CR terhadap ROA pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis apakah ada pengaruh positif BOPO terhadap ROA pada lembaga keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan pengaruh positif NIM, CR, dan BOPO terhadap ROA yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam pengaruh perbedaan NIM, CR, dan BOPO terhadap kinerja keuangan antara PD BPR BKK dan PD BKK se- Provinsi Jawa Tengah secara nyata dan membandingkannya dengan teori-teori yang didapat dari literatur.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa tengah yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan manajemen untuk membantu meningkatkan *profit* serta mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para calon kreditur maupun investor pada saat melakukan investasi.

1.5. Sistematika Penelitian

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menggambarkan mengapa peneliti memilih topik penelitiannya, mengamati dan mendefinisikan *fenomena* permasalahan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan penelitian terdahulu maka dapat dijadikan rumusan masalah yang akan diteliti. Dari rumusan masalah kemudian dapat disimpulkan menjadi tujuan penelitian kemudian dirumuskan kegunaan penelitian secara teoritis, dan praktis.

Bab II adalah telaah pustaka dan pengembangan model yang menggambarkan landasan teori yaitu teori yang dikemukakan oleh para peneliti dan ahli terkait dengan komponen variabel yang akan diteliti, dan juga didasarkan oleh penelitian terdahulu yang sudah dilakukan pengujian yang dibuktikan dengan adanya perbedaan yang *signifikan*. Kemudian dapat disimpulkan hipotesis penelitian dimana berisi tentang jawaban yang bersifat sementara yang masih harus dibuktikan yang digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis yang merupakan alur berfikir penelitian.

Bab III tentang metode penelitian dimana memuat obyek tempat yang dijadikan sample penelitian, jenis data merupakan data sekunder dan sumber data yang diperoleh dari laporan keuangan. Populasi dan sampel merupakan jumlah, periode obyek yang akan diteliti dan metode pengambilan sampel, kemudian teknik pengumpulan data didasarkan pada dokumentasi data sekunder dengan mencatat laporan keuangan. Variabel penelitian, variabel penelitian dan teknik analisa data (statistik deskriptif dan uji hipotesis).

Bab IV berisi analisis data yang terdiri dari gambaran umum obyek penelitian dan data deskriptif, proses dan hasil analisis atau komputasi data, sertapengujian hipotesis atau pertanyaan penelitian kemudian disimpulkan.

Bab V Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan yang memuat kesimpulan, implikasi kebijakan, keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang.